



Threat of Abstention as a Form of Community Political Criticism Case Study in Rather Village, Sebangki District, Landak Regency

Herri Junius Nge

Universitas Tanjungpura

Corresponding Author: Herri Junius Nge herri.junius@fisip.untan.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords: Abstention,
General Elections, Social
Movements

Received : 15 November

Revised : 17 December

Accepted: 27 January

©2024 Nge: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

The phenomenon of the threat of abstention is an indication that there is public disappointment with the government. Even though abstaining from voting is a citizen's right, the existence of a collective movement not to vote is a warning to the government regarding the quality of democratic life. The aim of this research is to analyze the emergence of the threat of abstention as a form of political criticism in the community in Punyanget Hamlet, Agak Village, Sebangki District, Landak Regency. The method used to achieve the research objectives is qualitative, with a case study type of research.. The results of the research show that the threat of abstention from the residents of Punyanget Hamlet as a form of social movement is caused by the alienation of residents who are lagging behind in terms of development compared to other hamlets. This has raised the collective awareness of the hamlet residents, involving community leaders, to carry out action in the form of an abstention movement in the 2024 elections. Community social movements as a form of collective action are able to provide reactions to related parties, because the actions taken take advantage of the political moment related to the event. general elections. Even though this movement tends to be incidental and not designed with a clear movement structure, it is able to build the collective spirit of citizens to carry out protests with the threat of abstaining from voting in the 2024 elections, by using social media as a platform for the movement to gain public support.

Ancaman Golput sebagai Bentuk Kritik Politik Masyarakat Studi Kasus di Desa Agak Kecamatan Sebangki Kabupaten Landak

Herri Junius Nge

Universitas Tanjungpura

Corresponding Author: Herri Junius Nge herri.junius@fisip.untan.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords: Golput,
Pemilihan Umum,
Gerakan Sosial

Received : 15 November

Revised : 17 December

Accepted: 27 January

©2024 Nge: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Fenomena ancaman golput menjadi indikasi bahwa terdapat kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah. Kendati golput merupakan hak warga negara, namun adanya gerakan kolektif untuk tidak memilih menjadi *warning* bagi pemerintah terkait dengan kualitas kehidupan demokrasi. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis munculnya ancaman golput sebagai bentuk kritik politik masyarakat di Dusun Punyanget Desa Agak Kecamatan Sebangki Kabupaten Landak. Metode yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian adalah kualitatif, dengan jenis penelitian studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ancaman Golput warga Dusun Punyanget sebagai bentuk gerakan sosial disebabkan oleh adanya alienasi warga yang tertinggal dalam hal pembangunan dibandingkan dengan dusun lainnya. Hal ini telah membangkitkan kesadaran kolektif warga dusun yang melibatkan para tokoh masyarakat, untuk melaksanakan aksi dalam bentuk gerakan golput pada pemilu tahun 2024. Gerakan sosial masyarakat sebagai bentuk tindakan kolektif mampu memberikan reaksi kepada pihak terkait, karena aksi yang dilakukan memanfaatkan moment politik berkaitan dengan perhelatan pemilihan umum. Kendati gerakan ini cenderung incidental dan tidak terdesain dengan struktur gerakan yang jelas, tetapi mampu membangun semangat kolektif warga untuk melakukan aksi protes dengan ancaman golput pada pemilu tahun 2024, dengan memanfaatkan media sosial sebagai wadah gerakan agar mendapatkan dukungan publik.

PENDAHULUAN

Negara yang menganut sistem demokrasi memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi warga untuk berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan, tidak terkecuali bidang politik. Partisipasi politik merupakan ekspresi masyarakat terhadap kehidupan dalam sistem politik, tuntutan dari berbagai kelompok masyarakat perlu diakomodir oleh sistem politik selama memenuhi kaidah-kaidah konstitusi. Dalam mengekspresikan aspirasi politiknya, berbagai cara dilakukan oleh masyarakat yang salah satunya adalah tidak ikut berpartisipasi dalam pemilu.

Kualitas demokrasi di Indonesia masih dibayangi oleh ancaman golongan putih (golput) dari sebagian warga. Golput ditujukan untuk mereka yang sudah memenuhi syarat dan boleh berpartisipasi dalam pemilu dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tetapi tidak ikut memilih atau abstain dalam pemilu. Selama masa pemerintahan orde baru, rezim melakukan mobilisasi dan mewajibkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu dengan memilih salah satu peserta pemilu yang notabene adalah partai pemerintah yaitu Golongan Karya (Golkar). Akibat rezim yang represif, banyak masyarakat yang memilih tidak berpartisipasi (golput). Mereka yang memutuskan untuk tidak memilih golput melakukannya secara sadar dan siap dengan berbagai resiko karena dianggap melawan rezim saat itu. Pilihan golput dilakukan karena mereka melihat pemilu tidak dilaksanakan secara jujur. Di samping itu, pilihan untuk menjadi golput juga dilatarbelakangi adanya kekecewaan dan protes terhadap penyelenggaraan pemerintah yang tidak transparan dan akuntabel.

Fenomena golput yang terjadi pada orde baru, ternyata masih berlanjut di era reformasi. Kendati pelaksanaan pemilu di era reformasi terbilang lebih baik dari orde baru, namun tidak sedikit masyarakat yang tetap memilih golput. Uniknya pilihan golput pada era reformasi lebih leluasa disampaikan oleh masyarakat, sebagai bentuk protes atau ekspresi kekecewaan kepada pemerintah. Salah satu fenomena berkenaan dengan ancaman golput warga ditunjukkan oleh masyarakat Dusun Punyanget Kecamatan Sebangki Kabupaten Landak. Pada tanggal 7 April 2023 masyarakat Dusun Punyanget Desa Agak Kecamatan Sebangki Kabupaten Landak melakukan aksi penyampaian aspirasi berupa ancaman golput atau tidak memilih pada pemilu tahun 2024, masyarakat menunjukkan kekompakannya pada saat aksi protes kepada pemerintah pusat maupun daerah karena tidak memperhatikan pembangunan di wilayah desa mereka.



Gambar 1. Aksi Gerakan Ancaman Golput Warga Dusun Punyanget, 7 April 2023

Ancaman golput yang disampaikan oleh warga Dusun Punyanget Desa Agak dapat dilihat dari lingkup yang lebih luas sebagai representasi dari kondisi yang dirasakan beberapa desa di Kabupaten Landak, dan wilayah desa lainnya di Indonesia pada umumnya. Kekecewaan masyarakat terhadap janji pembangunan pemerintah yang tidak terealisasi adalah ekspresi warga dengan harapan bahwa protes yang disampaikan dapat diliput media dan mendapatkan perhatian dari pemerintah. Terdapat tren dalam era demokrasi digital bahwa masyarakat memanfaatkan kanal aspirasi melalui media sosial yang dapat langsung tersampaikan kepada pemerintah. Di beberapa kasus, berita yang viral dan mendapat respon dari masyarakat memiliki kecenderungan akan direspon dengan cepat oleh pemerintah.

Sejalan dengan berbagai fenomena yang telah dijelaskan dalam penjelasan tersebut, tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan, mengetahui dan menganalisis faktor yang menyebabkan munculnya ancaman golput sebagai bentuk kritik politik masyarakat di Dusun Punyanget Desa Agak Kecamatan Sebangki Kabupaten Landak.

TINJAUAN PUSTAKA

Golput (Golongan Putih)

Golongan putih bukan partai politik, bukan golongan karya, melainkan kegiatan kultural, kegiatan moral yang bertujuan menyebarluaskan pendidikan politik. (Sanit, 1992). Menurut Surbakti “golongan putih atau disebut juga “*No voting Decision*” adalah orang yang secara sadar dan sengaja mengambil sikap tidak memberikan suara dalam pemilihan umum dan juga disebabkan oleh kesalahan administratif serta faktor teknis”. (Surbakti, Memahami Ilmu Politik, 1992). “Golput bagi para sebagian besar penghayatan merupakan sebuah tindakan kritis terhadap eksistensi partai-partai politik, Negara, dan realitas yang ada diakibatkan dari mismanajemen Negara”. (Saksono, 2013). Menurut Efriza “golput adalah orang yang dengan sengaja datang ke TPS dan membuat pilihannya tidak sah dengan mencoblos gambar putih”. (Efriza, 2012) Ali

berpandangan di Indonesia terdapat dua kelompok golput yakni kelompok golput awam, dan kelompok golput pilihan. (Ali, 1999)

Gerakan Sosial

Gerakan sosial adalah tindakan kolektif yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi untuk mencapai perubahan atau tujuan sosial tertentu dalam masyarakat. Sebagai sebuah gerakan kolektif, gerakan sosial berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Salah satu tujuan dari gerakan sosial ialah melakukan suatu perubahan atau dengan sengaja melakukan perubahan sosial dalam masyarakat. Gerakan sosial biasanya muncul dari ketidakpuasan sejumlah orang terhadap situasi atau kondisi yang terjadi disekitarnya. Manalu (2017) menyatakan bahwa terdapat 4 perspektif gerakan sosial yang berkembang di Barat. Perspektif perilaku kolektif, perspektif mobilisasi sumber daya, perspektif proses politik, dan gerakan sosial baru.

Locer menjelaskan bahwa suatu gerakan sosial setidaknya memiliki tiga ciri khas seperti : terorganisir, membutuhkan waktu yang cukup lama, dan segera dibentuk. (Locer, 2002). Tarrow (1998: 4-5) mendefinisikan gerakan sosial sebagai tantangan kolektif yang dilakukan sekelompok orang yang memiliki tujuan dan solidaritas yang sama, dalam konteks interaksi yang berkelanjutan dengan kelompok elite, lawan, dan penguasa. Disini terdapat empat kata kunci penting, yakni tantangan kolektif, tujuan bersama, solidaritas sosial dan intraksi berkelanjutan. Menurut Tarrow faktor yang melatarbelakangi proses gerakan sosial adalah faktor-faktor struktur kesempatan politik, struktur-struktur mobilisasi dan kerangka gerakan serta bentuk-bentuk perlawanan. (Tarrow, 1998).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian adalah kualitatif, dengan jenis penelitian studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian lapangan dengan wawancara mendalam dan observasi, di samping itu pengumpulan data juga dilakukan melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan ancaman golput sebagai bentuk kritik politik masyarakat di Dusun Punyanget Desa Agak Kecamatan Sebangki Kabupaten Landak dianalisis dengan teori gerakan sosial Sidney Tarrow, tentang aspek pemicu gerakan, yaitu faktor-faktor struktur kesempatan politik, struktur-struktur mobilisasi, kerangka gerakan dan bentuk-bentuk perlawanan.

Faktor Struktur Kesempatan Politik

Dalam penelitian ini gerakan masyarakat untuk melakukan Golput pada Pemilu tahun 2024 hanya terfokus pada lingkup yang kecil, dan dapat dikatakan bahwa tidak terdapat struktur organisasi yang berjenjang/hierarki yang dapat mengawal aspirasi masyarakat sampai kepada pihak pengambil kebijakan.

Kendati demikian, ancaman Golput Warga Dusun Punyanget lebih dilihat dalam terminology yang lebih luas dengan adanya keberanian warga untuk memanfaatkan media sosial sebagai akses penyampaian tuntutan warga sebagai bentuk tekanan kepada pemerintah maupun pihak terkait yang memiliki relevansi dengan aspirasi atau tuntutan warga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Agak, diperoleh informasi bahwa “aksi warga Dusun Punyanget adalah bentuk akumulasi kekecewaan warga atas kondisi yang mereka alami. Jika dibandingkan dengan dusun lain, Dusun Punyanget sampai saat ini belum dialiri listrik, sehingga masyarakat menilai bahwa pemerintah baik daerah maupun pusat tidak memberikan perhatian atas apa yang mereka alami selama ini, sehingga walaupun dikatakan aksi mereka spontan, sebenarnya tidak juga karena ide untuk melakukan aksi ini sudah dirancang oleh insiator yang menjadi aktor dari aksi warga pada tanggal 7 April 2023 lalu”.

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh Kepala Desa Agak, menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh warga Dusun Punyanget dapat dilihat dari 2 (dua) sudut pandang, yang pertama, adalah masyarakat menilai bahwa mereka berani mempertaruhkan hak konstitusionalnya sebagai alat tawar menawar atau tekanan kepada pemerintah agar memenuhi apa yang menjadi tuntutannya, kendati hal ini dapat dinilai negative karena ancana golput dilaksanakan secara kolektif. Kedua, masyarakat mempertaruhkan reputasi wilayahnya yang akan berpotensi mendapatkan image negative dari publik, atas aksi yang mereka lakukan, karena gerakan mereka dinilai melegitimasi struktur pemerintahan yang menjadi fasilitator dalam menyampaikan aspirasi warga.

Aksi warga Dusun Punyanget terbilang cukup fantastik, karena hal ini dilakukan oleh kelompok masyarakat dari dusun terpencil yang secara umum apatis dan kurang memiliki keberanian untuk menyampaikan aspirasinya. Namun hal menarik adalah bagaimana aksi kolektif yang tentu saja dimotori oleh beberapa aktor di Dusun Punyanget memanfaatkan kesempatan untuk melakukan tekanan kepada pemerintah, melalui media sosial. Aksi yang dilakukan oleh warga Dusun Punyanget tersebut diupload di media sosial Instagram Landak Informasi yang pada akhirnya menjadi berita viral.

Pemanfaatan media sosial sebagai saluran aspirasi masyarakat saat ini menjadi suatu pola gerakan sosial yang dinilai cukup efektif dalam memberikan tekanan kepada pihak terkait, terutama pada pemerintah. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam beberapa kasus, berita yang viral terkait kritikan dan penyampaian aspirasi masyarakat di media sosial, seperti kasus pembangunan jalan di Provinsi Lampung, langsung mendapat perhatian penting dari pemerintah bahkan oleh Presiden dengan melakukan pengecekan langsung di lapangan. Kendati dalam kasus Lampung, kritikan dilakukan dengan menyindir langsung Gubernur di Provinsi tersebut, tidak sampai pada ancaman golput, namun karena berita yang disampaikan menjadi viral, maka kritikan tersebut direspon dengan cepat oleh pemerintah.

Ancaman Golput warga Dusun Punyanget pada Pemilu tahun 2024 memberikan gambaran bahwa masyarakat memanfaatkan moment politik untuk mendapatkan perhatian pemerintah, sekalipun jika benar akan terjadi Golput yang tinggi di Dusun Punyanget, tidak serta merta akan atau dapat mendelegitimasi pemimpin yang terpilih, baik di ranah pusat maupun daerah, namun paling tidak mereka mendapatkan ruang untuk menyampaikan apa yang menjadi keresahan selama ini. Dalam hal ini masyarakat menganggap bahwa gerakan sosial dengan ancaman golput adalah alternative yang lebih efektif untuk mendesak pemerintah. (Manalu, 2007)

Terkait dengan adanya kesempatan politik oleh warga Dusun Punyanget untuk mendapatkan perhatian pemerintah, Kepala Dusun Punyanget dalam wawancara yang penulis lakukan di lokasi penelitian diperoleh penjelasan sebagai berikut : "aksi yang dilakukan oleh warga Dusun Punyanget murni merupakan insiatif spontan warga dusun kami, masyarakat selama ini merasa bahwa mereka kurang diperhatikan oleh pemerintah, sudah berganti beberapa pemerintahan tetapi tidak memberikan perubahan, terutama listrik yang selama ini didambakan masyarakat. Tidak hanya itu, masyarakat Dusun Punyanget juga kecewa karean masuknya beberapa perusahaan Kepala Sawit tidak memberikan dampak yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat setempat".

Penjelasan yang disampaikan oleh Kepala Dusun Punyanget memberikan gambaran bahwa masyarakat meluapkan kekecewan mereka karena selama ini tidak mendapatkan perhatian sama sekali oleh pemerintah, terkait dengan kebutuhan masyarakat akan adanya aliran listrik dan juga lapangan kerja yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Aksi yang tidak melibatkan unsur pemerintah desa menjadi indikasi bahwasannya masyarakat Dusun Punyanget beranggapan bahwa pemerintah desa juga dinilai tidak memperjuangkan apa yang selama ini mereka keluhkan.

Apa yang dilakukan oleh warga Dusun Punyanget merupakan bentuk akumulasi terhadap apa yang selama ini selalu dijanjikan oleh pemda maupun oleh para caleg setiap perhelatan pemilu. Masyarakat merasa bahwa selama ini mereka hanya dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mendapatkan dukungan baik pada pemilu legislative maupun pilukada. Suara mereka berikan, namun apa yang dijanjikan selama ini tidak terealisasi. Kondisi yang dialami oleh warga Dusun Punyanget adalah salah satu potret dari sekian banyak kondiai aktual warga di Indonesia. Masih banyak masyarakat yang terisolir dan tidak mendapatkan sentuhan pembangunan, bahkan kondisinya mungkin lebih parah jika dibandingkan dengan Dusun Punyanget, akan tetapi sebagian ada yang pasrah dengan keadaan, sebagian menunggu bersabar dan sebagian melakukan perlawanan dengan berbagai cara, termasuk yang dilakukan oleh warga Dusun Punyanget.

Pengamatan penulis di lapangan terkait dengan kondisi aktual pembangunan di Dusun Punyanget menunjukkan bahwa masyarakat di dusun tersebut tidaklah separah atau seburuk seperti yang digambarkan dalam berita yang diviralkan oleh media sosial. Kendati akses jalan masih berupa jalan tanah dan jalan perusahaan, tetapi relative masih dapat diakses dengan mudah. Hanya saja sampai saat ini belum ada jaringan listrik untuk penerangan dan kebutuhan masyarakat. Aksi yang dilakukan merupakan akumulasi dari wujud kekecewaan masyarakat yang dengan berani mengutarakan aspirasinya dengan ikut memberikan pressure kepada pemerintah.

Sebagai sebuah gerakan kolektif, aksi warga Dusun Punyanget adalah bentuk gerakan yang mencoba keluar dari jalur formal bagi warga negara dalam memperjuangkan aspirasinya. Hal ini tidak terlepas dari adanya peluang dan kesempatan politik bagi warga untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah.

Kondisi di atas, sejalan dengan asumsi-asumsi pokok dari konsep struktur dan kesempatan politik, oleh Situmorang (dalam Tarrow, 2013:31) bahwa faktor kesempatan politik dapat dipergunakan sebagai variabel utama berkaitan dengan dua prinsip variabel dependent, yaitu, momentum aksi kolektif dan hasil aktivitas sebuah gerakan. McAdam dan Tarrow menambahkan dengan empat variabel tambahan dalam menjelaskan teori struktur kesempatan politik, pertama, gerakan sosial muncul ketika tingkat akses terhadap lembaga-lembaga politik mengalami keterbukaan.

Kendati hasil dari sebuah gerakan dalam konteks ancaman Golput warga Dusun Punyanget belum sampai pada hasil yang diperoleh, yaitu adanya perhatian dari pemerintah untuk membangun dusun dengan aliran listrik, jalan, lapangan kerja dan lain-lain. Hal yang patut diapresiasi adalah keberanian masyarakat dan kejelian melihat peluang untuk melakukan tekanan kepada pemerintah. Kondisi yang terjadi di Dusun Punyanget masih banyak dialami oleh desa-desa di Indonesia, tetapi tidak semuanya berani berteriak untuk menyuarakan aspirasinya, apalagi dengan melakukan ancaman golput. Adanya ruang untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah sampai kepada level tertinggi menjadikan gerakan masyarakat Punyanget dapat menjadi suatu hal yang akan memberikan dampak.

Hadirnya media sosial menjadikan masyarakat dapat dengan mudah dalam menyampaikan aspirasinya, karena media sosial mampu menembus ruang dan sekat-sekat waktu dan akan langsung terhubung dengan pengambil kebijakan. Sebagai contoh, ketika seorang Tiktoker asal Lampung bernama Bima Yudho mengkritik kondisi jalan di Provinsi Lampung dengan memanfaatkan media sosial TikTok, seketika itu juga aksinya mendapatkan dukungan dari netizen dan mampu mendorong pemerintah sampai pada level Presiden untuk turun tangan. Kendati aksi yang dilakukan oleh Bima bersifat individu, tetapi dengan memanfaatkan media sosial mampu menarik simpati publik untuk mempressure pemerintah agar turun tangan memperbaiki jalan di Lampung.

Faktanya sejak kritikan Bima Viral pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR mengambil alih pembangunan jalan di Lampung dan dampaknya saat ini jalan di Lampung sudah banyak yang diperbaiki. Demikian halnya dengan yang terjadi di Dusun Punyanget, aksi warga yang diviralkan oleh Instagram Landak Informasi, telah banyak mendapatkan perhatian, meskipun tidak sebesar kasus di Lampung.

Dalam wawancara dengan Kepala Desa Agak, diperoleh informasi bahwasanya keinginan masyarakat agar Listrik dapat masuk di Dusun Agak sudah mendapatkan respon dengan adanya pertemuan dengan PLN Rayon 5 untuk membicarakan proposal pendirian tiang listrik di Dusun Agak. Bahkan aspirasi masyarakat ini, juga mendapatkan perhatian dari wakil Rakyat dari Dapil Kalbar 1 yang juga merupakan Wakil Ketua Komisi V DPR RI. Setiap kali ada aksi, makam akan timbul reaksi. Hal ini juga berlaku dalam gerakan sosial, aksi dari warga Dusun Punyanget telah memberikan dampak kepada pihak terkait untuk bereaksi merespon tuntutan warga.

Faktor Struktur Mobilisasi

Gerakan sosial merupakan gerakan atas perjuangan kelompok dalam memperjuangkan kepentingan kelompok, di mana kepentingan-kepentingan tersebut lahir atas pertimbangan rasional dari setiap kelompok atas kondisi tertentu (mengacau atau mengancam eksistensi) kepentingan bersama, sehingga lahir solidaritas kolektif untuk melawan serta memperjuangkan kepentingannya. Perjuangan atas kepentingan bersama tersebut berakhir ketika tuntutan dari kelompok yang melakukan gerakan sosial telah terpenuhi oleh para elite, korporasi maupun pemerintah yang menjadi objek atau sasaran dari gerakan sosial. Selama tuntutan itu belum terpenuhi, maka gerakan-gerakan serupa berupa pengacauan-pengacauan yang sifatnya mengganggu atau memperlambat tujuan dari kelompok elite, korporasi maupun pemerintah akan terus dilakukan.

Selain struktur kesempatan politik, faktor lain yang berperan penting sebagai pendukung dalam protes-protes kolektif adalah faktor struktur mobilisasi dan strategi ataupun kerangka gerakan dalam mendukung protesprotes kolektif. Aspek struktur mobilisasi menurut penjelasan Tarrow (1998) adalah sebagai berikut: "Gerakan kolektif informal serta formal, di mana orang memobilisasi dan terlibat dalam aksi kolektif. Fokus pada kelompok tingkat meso, organisasi, dan jaringan informal yang terdiri dari blok bangunan kolektif gerakan sosial dan revolusi "(Situmorang, 2013: 33). Berdasarkan definisi di atas, aktor-aktor gerakan sosial tidak hanya mempergunakan organisasi gerakan sosial yang terstruktur, sumber daya pendanaan formal, memiliki jaringan sampai ke bawah dengan pola rekrutmen yang sistematis dan teratur tetapi juga organisasi informal seperti jaringan pertemanan, lingkungan perumahan, etnis dan kekerabatan.

Terkait dengan gerakan sosial yang dilakukan oleh warga Dusun Punyanget, dari hasil wawancara dengan Kepala Dusun Punyanget, diperoleh penjelasan sebagai berikut : “untuk aksi unjuk rasa warga Dusun Punyanget pada tanggal 7 April 2023, adalah spontan dan tidak ada organisasi atau wadahnya. Bahkan perangkat desa saja tidak dilibatkan. Namun sekalipun tidak bersifat spontan tetapi rencana ini sudah cukup lama ingin dilakukan oleh warga yang dimotori oleh salah seorang tokoh masyarakat”.

Berdasarkan penjelasan tersebut, menunjukkan bahwa aksi yang dilakukan oleh warga Dusun Punyanget tidak memiliki struktur yang jelas. Artinya gerakan ini tidak terorganisir secara formal. Namun dalam sebuah gerakan tentu terdapat *leader* sebagai penggerak yang dapat memobilisasi massa untuk ikut aktif dalam gerakan yang dilakukan. Sejalan dengan kondisi tersebut, dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Agak, diperoleh informasi sebagai berikut : “untuk aksi yang dilakukan oleh warga Dusun Punyanget memang ada yang mengkoordinir, tentu kita bisa memahami kalau selama ini masyarakat Dusun Punyanget menuntut kepada pemerintah atas pembangunan di dusun tersebut, dan pemerintah desa sudah mengajukan proposal, tetapi masyarakat kurang bersabar karena memang untuk pengajuan itu memerlukan proses”.

Penjelasan yang disampaikan oleh Kepala Desa Agak menunjukkan bahwa terdapat *leader* yang menggerakkan aksi warga. Tentu saja *leader* tersebut adalah tokoh yang vocal dan berpengaruh di Dusun Punyanget, meski kepemimpinan formal adalah kepada Desa, tetapi keberadaan tokoh masyarakat sebagai pemimpin informal juga mendapat tempat di masyarakat, disegani dan dihormati. Tidak mengherankan manakala aksi yang dilakukan pada tanggal 7 April 2023 itu mendapatkan respond dan dukungan dari masyarakat.

Terkait dengan stuktur gerakan yang dilakukan oleh warga Dusun Punyanget, Kepala Desa sebagai pemimpin formal dan mendapatkan legitimasi dari undang-undang memberikan tanggapan terkait dengan aksi warga yang digerakkan oleh beberapa tokoh masyarakat di Dusun Punyanget yang juga merupakan bagian dari wilayah Desa Agak, sebagai berikut : “kita menghormati apa yang dilakukan oleh warga Dusun Punyanget, apalagi kalau memang mereka konsisten untuk melakukan perjuangannya, tetapi sebaiknya tidak dengan Golput. Kalau pun ada yang Golput diharapkan tidak mengajak atau memaksa yang lain untuk Golput, karena itu adalah hak konstitusional. Kita memang beberapa kali berdiskusi dengan warga Dusun Punyanget agar sabar bahwa pemerintah Desa sudah memperjuangkan Listrik untuk warga Dusun Punyanget, tetapi perlu waktu atau sabar. Kita khawatir jika benar-benar masyarakat nanti Golput akan berdampak kepada proposal yang sudah kita ajukkan kepada PLN”.

Penjelasan yang disampaikan oleh Kepala Desa memberikan gambaran bahwa aksi yang dilakukan oleh warga memiliki struktur yang tidak bersifat formal, namun demikian dengan kondisi yang dialami oleh warga, maka pengaruh tokoh masyarakat untuk melakukan aksi cukup signifikan.

Aspek penguatan dalam hal ini adalah tidak sekedar masalah tentang penerangan atau listrik, tetapi juga isu lain seperti jalan, lapangan pekerjaan dan lain-lain. Isu-isu inilah yang pada akhirnya membuat seolah-olah aksi yang dilakukan menjadi terorganisir.

Aspek struktur gerakan dalam hal ini lebih terlihat sebagai upaya terorganisir secara wilayah dalam lingkup dusun, yang tentu saja sebagian besar terikat oleh adanya unsur kekeluargaan atau kekerabatan. Berkenaan dengan faktor mobilisasi, aktor inisiasi gerakan intelektual sebatas menggunakan jaringan formal, tetapi juga jaringan informal. Dalam hal gerakan ancaman golput ini, ikatan wilayah dalam lingkup dusun serta hubungan kekeluargaan diantara warga merupakan bagian dari struktur gerakan sosial.

Faktor Kerangka Gerakan

Setiap gerakan timbul dari adanya faktor pemicu. Dalam banyak faktor gerakan sosial tentu membawa sebuah isu dan agenda yang ditujukan untuk memperjuangkan nilai-nilai yang diyakini oleh kelompok pergerakan, termasuk dalam hal ini untuk kepentingan positif atau negative. Sebagaimana telah disinggung pada penjelasan terdahulu, munculnya gerakan ancaman golput di Desa Agak, merupakan wujud dari perjuangan masyarakat untuk menuntut adanya keadilan alokasi sumber daya. Secara lebih rinci dapat dipahami sebagai aksi bersama untuk mendapatkan perhatian dari pihak yang berwenang yakni pemerintah.

Dalam wawancara dengan salah seorang warga Dusun Punyanget, terkait dengan aksi pada tanggal 7 april 2023, diperoleh penjelasan terkait dengan rencana aksi warga sebagai berikut : “memang kalau dilihat terkesan bahwa yang kita lakukan adalah tiba-tiba tanpa ada perencanaan, tetapi sebenarnya aksi tersebut jauh hari sudah dipersiapkan, paling tidak sudah pernah didiskusikan bahwa akan melakukan aksi, sampai pada perbincangan memutuskan untuk menggunakan ancaman golput. Awalnya kita membicarakan tentang ketertinggalan pembangunan di Dusun Punyanget, karena lokasinya jauh dari pusat desa Agak, dusun yang lain sudah dapat layanan listrik, akses internet dan jalan yang baik, tetapi Dusun Punyanget belum menikmati hal tersebut”.

Bertitik tolak dari penjelasan warga Dusun Punyanget, menunjukkan bahwa sudah ada kerangka aksi, walaupun tidak terlembaga secara formal. Adanya diskusi atau musyawarah tentang aksi untuk Golput didasarkan atas inisiatif dan keputusan dari beberapa pihak. Setelah adanya kesepakatan, langkah selanjutnya adalah mempersiapkan agenda dan waktu pelaksanaan serta penyebaran informasi untuk memobilisasi warga dusun.

Kerangka gerakan adalah hal urgen yang dipakai insiator gerakan sebagai alat utama dalam melakukan protes kolektif, kerangka gerakan timbul dari interpretasi atau pembacaan secara mendalam bagaimana dan seharusnya gerakan protes kolektif tersebut harus dilakukan sehingga mampu mewujudkan tujuan dari gerakan tersebut.

(Tarrow, 1998) Peristiwa yang terjadi pada tanggal 7 April 2023 adalah hasil dari intensitas inisiasi aktor yang berupaya melakukan mobilisasi melalui aksi propaganda-propaganda kepada warga untuk mendapatkan dukungan agar aksi dapat dijalankan.

Berkenaan dengan aksi yang dilakukan oleh warga Dusun Punyanget, sebagaimana pandangan Tarrow terkait dengan aksi sosial sudah menunjukkan kerangka gerakan, karena aksi kolektif sudah terlihat. Kendati demikian, kerangka gerakan ini akan diuji konsistensinya sejauhmana bentuk perlawanan masih terus diusarkan sampai pada terpenuhinya tuntutan. Tentu saja untuk melihat sejauhmana konsistensi tersebut, akan tercermin dari tingkat partisipasi politik warga Dusun Punyanget dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024. Apabila masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih tetap memilih golput, maka dapat dikatakan mereka konsisten dengan perjuangan yang dilakukan. Namun sebaliknya, apabila masyarakat berpartisipasi pada pelaksanaan pemilu, maka dapat dikatakan bahwa perjuangan mereka tidak konsisten.

Sehubungan dengan apakah masyarakat Dusun Punyanget masih tetap konsisten untuk Golput pada pemilu tahun 2024, dari hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa Agak, diperoleh penjelasan sebagai berikut : "sebagai pemerintah Desa, selama ini kita juga ikut memperjuangkan aspirasi masyarakat Dusun Punyanget, terutama keinginan mereka untuk mendapatkan aliran listrik dari PLN. Kita dalam hal ini sudah meneruskan proposal ke PLN dan sudah ada tindak lanjut, dengan adanya pengukuran titik-titik untuk pemasangan tiang listrik PLN. Hanya saja aksi warga kemarin memang tidak dapat kita cegah, karena warga juga sudah sangat kecewa karena lamanya proses permohonan warga. Setelah adanya titik terang bahwa sudah dilakukan pengukuran titik pendirian tiang, sebagian warga yang kemarin mengikuti aksi sudah berfikir ulang untuk melakukan Golput pada pemilu tahun 2024".

Berdasarkan penjelasan tersebut, menunjukkan bahwa tindakan kolektif yang terframing pada aksi tanggal 7 April 2023, tidaklah merupakan tindakan kolektif murni dari seluruh warga Dusun Punyanget. Artinya ada sebagian masyarakat yang tidak paham tetapi ikut-ikutan, karena mereka tergerak oleh spirit solidaritas. Dapat dikatakan ekspresi atau emosi sesaat, atau bisa saja sekedar untuk meramaikan. Tidak semua peserta yang ikut memahami tindakan yang mereka lakukan dan konsekuensinya, namun demikian kehadiran mereka tentu saja memberikan symbol bahwa aksi tersebut sebagai sebuah tindakan kolektif.

Bentuk Perlawanan

Gerakan sosial dengan memberikan ancaman kepada rezim adalah bentuk perlawanan karena masyarakat merasa termarginalkan dari daerah ataupun kelompok lainnya. Ketimpangan yang timbul pada suatu komunitas beranjak dari suatu keadaan tatanan sosial, ekonomi, dan politik yang berdampak pada perubahan suatu tatanan sosial serta memberikan dampak negatif terhadap masyarakat.

Joe Fowerker mengutip Mouffe mengatakan faktor keluhan berupa perampasan, kehilangan, kerugian dan kerusakan dalam bentuk baru yang dialami secara kolektif, sehingga hal tersebut dapat memicu terjadinya gerakan sosial. (Situmorang, 2013). Terkait dengan alasan dilakukannya aksi warga Dusun Punyanget yang mengancam akan Golput pada Pemilu tahun 2024, dari hasil wawancara penulis dengan salah seorang tokoh masyarakat Dusun Punyanget memberikan penjelasan bahwa : “aksi yang dilakukan oleh warga Desa Dusun Punyanget pada tanggal 7 april 2023 bertempat di Dusun Punyanget dikarenakan masyarakat merasa selama ini mereka kurang diperhatikan oleh pemerintah terkait dengan janji-janji pembangunan yang sampai saat ini belum sama sekali tampak realisasinya, sehingga kita secara sadar dan juga bertanggungjawab untuk memutuskan Golput pada pemilu tanggal 14 february 2024. Kita merasa bahwa memilih atau tidak dalam pemilu kurang memberikan dampak terhadap pembangunan di Dusun Punyanget”.

Penjelasan yang dikemukakan oleh salah seorang tokoh masyarakat tersebut, menunjukkan bahwa gerakan kolektif yang mereka lakukan adalah akumulasi dari kekecewaan warga terhadap pemerintah yang selama ini tidak memberikan perhatian serius kepada mereka, terutam dalam hal pembangunan. Suatu hal yang wajar apabila warga menuntut hak dan melampiaskan rasa prustasi mereka kepada pihak pemerintah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan. Dalam kondisi ini gerakan masyarakat untuk menuntut pemerintah sangat sulit untuk dihindari. (Wahyudi, 2022)

Alasan lain terkait dengan gerakan kolektif masyarakat yang mengancam untuk melakukan Golput pada pemilu tahun 2024, terungkap dari penjelasan salah seorang warga Dusun Punyanget yang memberikan penjelasan sebagai berikut : “paling tidak ada 2 hal yang melatarbelakangi kita untuk melakukan aksi untuk memilih Golput dalam pemilu, selain masalah belum jelas dan belum ada tanda-tanda masuknya PLN di dusun kita, kami juga menilai bahwa dusun ini masih banyak hal yang merugikan masyarakat terkait dengan masuknya perusahaan Kepala Sawit, memang kita mendapatkan manfaat, salah satunya yaitu adanya lapangan kerja baru bagi warga Dusun Punyanget, baik sebagai buruh di kebun maupun di pabrik, serta sebagai supir Dum Truck maupun CPO. Tetapi jumlah pekerja dari dusun tersebut sebagian besar adalah buruh kasar, sementara untuk posisi jabatan strategis di perusahaan masih minim”.

Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat yang prustasi sangat mudah diprovokasi untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah ataupun perusahaan yang selama ini tidak memberikan keadilan kepada mereka. Tidak mengherankan apabila pada akhirnya aksi yang dilakukan oleh warga Dusun Punyanget pada tanggal 7 April 2023 mendapatkan dukungan dari sebagian besar warga desa. Aktor atau inisiator kegiatan aksi warga Dusun Punyanget ikut mempengaruhi warga untuk ikut bergerak dan mendukung aksi mengancam tidak akan memilih atau golput pada pemilu tahun 2024.

Dalam wawancara yang dilakukan dengan Kepala Dusun Punyanget menjelaskan bahwa pada aksi yang dilakukan oleh warga, sama sekali tidak memberitahukan atau melibatkan pemerintah desa yang dalam hal ini adalah Kepala Dusun. Sebagai suatu tindakan kolektif, tentu inisiator aksi memanfaatkan adanya situasi bahwa masyarakat ikut mendukung gerakan tersebut, kendati aksi yang dilakukan tidak semuanya mendapatkan dukungan dari masyarakat. Hal ini terungkap dari hasil wawancara dengan Kepala Dusun Punyanget yang memberikan penjelasan sebagai berikut : “pada saat aksi dilaksanakan memang terkesan bahwa semua warga ikut mendukung, termasuk mereka melibatkan anak-anak yang seolah-oleh hal tersebut merupakan kekompakan masyarakat. Sebagaimana masyarakat hanya terbawa saja atau ikut-ikutan mendukung, apalagi mereka sudah terprovokasi bahwa aksi mereka sebagai upaya untuk menagih janji pemerintah agar memperhatikan pembangunan Dusun Punyanget”,

Tidak dapat dipungkiri bahwa aksi masyarakat tersebut merupakan hal yang dimungkinkan dalam negara yang menganut sistem demokrasi selayaknya Indonesia. Masyarakat baik individu maupun kelompok diberikan ruang sebesar-besarnya untuk dapat berpartisipasi seperti dalam menyampaikan aspirasi. Manariknya aksi ini juga diikuti dengan ancaman golput oleh warga yang lazim dilakukan oleh masyarakat. Umumnya gerakan sosial yang dilakukan melalui aksi demonstrasi atau unjuk rasa hanya sebatas penyampaian aspirasi pada lembaga legislative, setelah mereka menyampaikan aspirasinya kepada wakil rakyat atau perwakilan pemerintah, aksi yang dilakukan selesai. Tetapi mereka akan konsisten untuk mengawal aspirasi mereka sampai sejauhmana telah direspon atau ditindaklanjuti sampai pada tahap realisasi.

Melihat apa yang dilakukan oleh warga Dusun Punyanget, aksi yang dilakukan tidak sekedar hanya penyampaian aspirasi biasa, tetapi juga diikuti dengan adanya tekanan dalam bentuk ancaman. Ancaman kepada pemerintah akan berimbas kepada respon dari pemerintah terhadap aksi tersebut, karena berhubungan dengan stabilitas politik menjelang pemilihan umum. Ancaman Golput kepada pemerintah merupakan suatu upaya agar pemerintah dan partai politik memperhatikan aspirasi masyarakat. Dalam terminology golput, aksi yang dilakukan oleh masyarakat tidak terlepas dari adanya kalkulasi untung rugi dalam menggunakan hak pilihnya. (Rinjani A. , 2014) Kendati masih sebatas ancaman, tetapi upaya yang dilakukan oleh warga Dusun Punyanget adalah bentuk keberanian yang memiliki konsekuensi terhadap citra atau nama baik dusun Punyanget dan Desa Agak. Masyarakat merasa bahwa apa yang mereka lakukan bukan tanpa pertimbangan, tetapi hal ini terpaksa sebagai akibat keputusan karena pemerintah yang tidak memperhatikan aspirasi masyarakat dusun tersebut.

SIMPULAN

Ancaman Golput warga Dusun Punyanget sebagai bentuk gerakan sosial disebabkan oleh adanya ailenasi warga yang tertinggal dalam hal pembangunan dibandingkan dengan dusun lainnya. Hal ini telah membangkitkan kesadaran kolektif warga dusun yang melibatkan para tokoh masyarakat, untuk melaksanakan aksi dalam bentuk gerakan golput pada pemilu tahun 2024. Gerakan sosial masyarakat sebagai bentuk tindakan kolektif mampu memberikan reaksi kepada pihak terkait, karena aksi yang dilakukan memanfaatkan moment politik berkaitan dengan perhelatan pemilihan umum. Kendati apa yang menjadi perjuangan masyarakat belum sepenuhnya terealisasi, tetapi aksi tersebut sudah mampu memberikan tekanan kepada pihak terkait, sehubungan dengan tuntutan mereka, yaitu masuknya listrik di Dusun Punyanget, dengan dilakukannya pengukuran dan penetapan titik tiang listrik. Kendati gerakan ini cenderung incidental dan tidak terdesain dengan struktur gerakan yang jelas, tetapi mampu membangun semangat kolektif warga untuk melakukan aksi protes dengan ancaman golput pada pemilu tahun 2024, dengan memanfaatkan media sosial sebagai wadah gerakan agar mendapatkan dukungan publik. Berdasarkan hasil penelitian, disampaikan saran-saran yakni sebagai sebuah gerakan, ancaman Golput yang dilakukan oleh warga Dusun Punyanget Desa Agak Kecamatan Sebangki memerlukan konsistensi atas apa yang selama ini mereka perjuangkan. Tuntutan kepada pemerintah diharapkan tidak sebatas ancaman saja, tetapi memerlukan pengawalan sampai sejauhmana aspirasi tersebut telah diproses hingga tahap realisasi. Agar gerakan sosial masyarakat berjalan efektif, maka perlu adanya kesadaran kolektif untuk tetap mempertahankan nilai-nilai gerakan, sampai pada tahap terwujudkan tujuan yang diinginkan, dengan membentuk struktur gerakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Rafni, & Farzianto, R. (2020). Orientasi Politik Santri Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 . (*Studi di Pondok Pesantren Darul Ulum Kelurahan Aia Pacah Kota Padang*), 105.
- Ali, N. (1999). *Peradaban Komunikasi Politik*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Almond, G., & Verba, S. (1990). *Budaya Politik*. Jakarta: Bina Aksara.
- Bartels, L. M. (2012). *The Study of Electoral Behavior*. Oxford: Oxford University Press.
- Bobonglangi, S. (2014). Perilaku Golongan Putih Dalam dalam pemilihan gubernur dan wakil Gubernur Tahun 2013 di Sulawesi Selatan. *Jurnal Politico*, 78-85.
- Efriza. (2009). *Dari Ilmu Politik Sampai Sistem Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
- Efriza. (2012). *Political Explore*. Bandung: Alfabeta.
- Fadillah, P. (2003). *Partai Politik dan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Firmanzah. (2007). *Marketing Politik, Antara Pemahaman dan Realitas*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

- Kantaprwira, R. (1990). *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Lau, R. R., & Redlawsk, D. P. (2006). *How Voter Decide*. United States of America: Cambridge University Press.
- Lestari, K. A. (2021). *Semakin Meningkatnya Persentase Golput Khususnya Dikala Pandemi, Hak Golput Bagi Rakyat Menurut Perspektif Hukum dan HAM*. *Ganesha Civic Education Journal*, 37-46.
- Locer. (2002). *Collective Behavior*. New Jersey: Pearson Education.
- Makhasin, L. (2016). *Orientasi Ideologi dan Pragmatisme Politik Model Pembentukan Koalisi dalam Pilkada Serentak di Jawa Tengah 2015*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 238.
- Manalu, D. (2007). *Gerakan Sosial dan Perubahan Kebijakan Publik Kasus Perlawanan Masyarakat Batak Vs PT Inti Indorayon Utama di Porsea Sumatera Utara*. *Populasi*, 27-50.
- Nazarudin, S. (1993). *Dinamika Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Nularna, P. (2017). *Orientasi Politik Pemilih Perempuan*. *Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah*, 15 nomor 1, 5.
- Nursal, A. (2004). *Political Marketing, Strategi memenangkan Pemilu Sebuah Pendekatan Baru Kampanye Pemilihan DPR, DPD, Presiden*. Jakarta: Gramedia.
- Rinjani, A. (2014). *Studi Tentang Golongan Putih (Golput) Dalam Pilkada Gubernur Kaltim 2013 di Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 69-81.
- Sanit, A. (1992). *Aneka Pandangan Fenomena Golput*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Situmorang, W. A. (2013). *Gerakan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sjamsudin. (1993). *Dinamika Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Surbakti, R. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.
- Suryadi, B. (2012). *Sosiologi Politik Sejarah, Definisi dan Perkembangan Konsep*. Yogyakarta: IRCiSOD.
- Tarrow, S. (1998). *Social Movements and Contentious Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Wahyudi, M. (2022). *Relasi Pemerintah-Gerakan Sosial : Studi Pada Gerakan Lingkungan Jelantah4change*. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 383-404.
- Yunita, R. P., & Stanislaus, S. (2014). *Orientasi Politik Pemilih Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014*. *Journal of Social and Industrial Psychology, Volume 3 Nomor 1*, 3.